

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG MANAJEMEN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. Manajemen Pendidikan

1. Pengertian Manajemen

Untuk menjelaskan arti manajemen, tidak dapat terlepas dari pengertian ilmu administrasi pendidikan, yaitu penggunaan atau aplikasi ilmu administrasi ke dalam pendidikan, oleh karena itu ada baiknya terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud “administrasi.” The Dictionary of Management memberikan definisi tentang administrasi yaitu: “activities concerned with applying rules, procedures and policies determined by others.”¹ Artinya: Administrasi adalah aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan penerapan aturan-aturan, prosedur dan penentuan kebijakan oleh orang lain.

Namun administrasi dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan didalam mencapai tujuan.² Administrasi bila diberi batasan sebagai usaha pengorganisasian dan pengarahan sumber tenaga manusia maupun benda dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun Edited by P J Hills dalam

¹ Herak French dan Heather Seward, *The Dictionary of Management* (London: Pans Book, 1982), 9.

² Ngalim Purwanto, MP., *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 1.

bukunya a dictionary of education berpendapat tentang manajemen, yaitu “management is a difficult term to define and managers jobs are difficult to edentify with precision”.³ Artinya manajemen adalah istilah yang sangat sulit untuk didefinisikan dan pekerjaan pemimpin yang sulit untuk diidentifikasi dengan teliti.

Meskipun demikian berbeda dengan yang diungkapkan oleh Houghton sebagaimana yang dikutip oleh Mutthowi (1996) merumuskan tentang manajemen adalah sebagai berikut:

ان الإدارة هي الإصطلاح الذي يطلق على التوجيه والرقابة ودفع القوى العاملة الى العمل في المنشأة⁴

Yang dimaksud dengan manajemen adalah suatu aktivitas yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan dan pengarahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dalam suatu organisasi.

Sehingga manajemen dapat diartikan suatu proses sosial yang direncanakan untuk menjamin kerja sama, partisipasi dan keterlibatan sejumlah orang dalam mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang ditetapkan secara efektif. Manajemen mengandung unsur bimbingan, pengarahan, dan pengarahan sekelompok orang terhadap pencapaian sasaran umum. Sebagai proses sosial, manajemen meletakkan fungsinya pada interaksi orang-orang, baik yang berada

³ P J. Hills, *A Dictionary of Education* (London: Routledge Books, 1982), 54

⁴ Ibrahim Ihsmat Mutthowi, *Al-Ushul Al-Idariyah Li Al-Tarbiyah* (Riad: Dar Al- Syuruq, 1996),13.

di bawah maupun berada di atas posisi operasional seseorang dalam suatu organisasi.⁵

Sebagaimana halnya sabda nabi saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة (رواه البخاري).⁶

“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Apabila suatu urusan diserahkan pada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran.” (H.R. Bukhori)

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi manajemen adalah menempatkan orang pada posisinya yang tepat. Rasulullah saw memberi contoh dalam hal ini sebagaimana menempatkan orang di tempatnya. Hal ini misalnya dapat dilihat bagaimana Abu Hurairah ditempatkan oleh Rasulullah saw sebagai penulis hadits atau dapat dilihat bagaimana Rasulullah menempatkan orang-orang yang kuat setiap pekerjaan dan tugas sehingga posisinya benar-benar sesuai dengan keahliannya.

Dari pemikiran-pemikiran diatas dapat dipahami unsur-unsur yang terkandung dalam manajemen, adalah:

- a. Bahwa manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan.
- b. Manajemen merupakan sistem kerja sama yang kooperatif dan rational.
- c. Manajemen menekankan perlunya prinsip-prinsip effeciency.

⁵ Soebagio Admodiwiro, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Arda Dizya Jaya, 2000), 5.

⁶ Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz I (Berut: Daar Al Kutub, 1992), 26.

d. Manajemen tidak dapat terlepas dari kepemimpinan atau pembimbing.

2. Prinsip Manajemen

Pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam praktik manajemen antara lain menentukan metode kerja, pemilihan pekerjaan dan pengembangan keahlian, pemilihan prosedur kerja, menentukan batas-batas tugas, mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas, melakukan pendidikan dan latihan, melakukan sistem dan besarnya imbalan itu dimaksudkan untuk meningkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja.⁷

Dalam kaitannya dengan prinsip dasar manajemen, Fayol mengemukakan sejumlah prinsip manajemen, yaitu:

a. Pembagian kerja

Semakin seseorang menjadi spesialis, maka pekerjaannya juga semakin efisien.

b. Otoritas

Manajer harus memberi perintah/tugas supaya orang lain dapat bekerja.

c. Disiplin

Setiap anggota organisasi harus menghormati peraturan-peraturan dalam organisasi.

⁷ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 12.

d. Kesatuan perintah

Setiap anggota harus menerima perintah dari satu orang saja, agar tidak terjadi konflik perintah dan kekaburan otoritas.

e. Kesatuan arah

Pengarahan pencapaian organisasi harus diberikan oleh satu orang berdasarkan satu rencana.

f. Pengutamaan kepentingan umum/organisasi dari pada kepentingan pribadi.

g. Pemberian kontra prestasi

h. Sentralisasi/pemusatan

Manajer adalah penanggung jawab terakhir dari keputusan yang diambil.

i. Hierarki

Otoritas wewenang dalam organisasi bergerak dari atas ke bawah.

j. Teratur

Material dan manusia harus diletakkan pada waktu dan tempat yang serasi.

k. Keadilan

Manajer harus adil dan akrab dengan bawahannya.

l. Kestabilan staf

Perputaran karyawan yang terlalu tinggi menunjukkan tidak efisiennya fungsi organisasi.

m. Inisiatif

Anggota harus diberi kebebasan untuk membuat dan menjalankan rencana.

n. Semangat kelompok

Peningkatan semangat kelompok akan menimbulkan rasa kesatuan.⁸

3. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi merupakan suatu besaran yang berhubungan jika besaran satu berubah maka besaran yang lain juga berubah.⁹ Pada dasarnya fungsi manajemen ini sangat mengait dengan tujuan manajemen, dimana tujuan itu sendiri adalah suatu hasil akhir, titik akhir atau segala sesuatu yang akan dicapai. Oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah yang harus ditempuh melalui manajemen, yakni fungsi manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan kontrol/evaluasi. Empat fungsi dalam manajemen ini akan sangat membantu sekali dalam upaya pencapaian tujuan.

a. Perencanaan (*planning*)

Dalam sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu adanya perencanaan. Perencanaan dalam sebuah lembaga adalah sangat esensial, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan yang lebih

⁸ Kadarmansi dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 32.

⁹ Admodiwiro, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, 13.

penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Tanpa adanya perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan. Ada empat langkah atau tahap dasar perencanaan, yaitu:

Pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya-sumber daya yang secara tidak efektif. *Kedua*, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. *Ketiga*, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah. *Keempat*, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.¹⁰

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Kata organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian. Sebagai suatu cara dimana

¹⁰ Suad Husnan, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1989), Cet. I, 29.

kegiatan dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan dapat tercapai dengan efisien. Oleh sebab itu langkah awal yang harus ditempuh dalam pengorganisasian adalah penyusunan struktur organisasi atau lembaga, sesuai dengan tujuan, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Sehingga akan jelas kewenangan-kewenangan dan job kerjanya atau pembagian kerja.¹¹

Prinsip-Prinsip Organisasi:

- 1) Memiliki tujuan yang jelas
- 2) Adanya kesatuan arah sehingga dapat terwujud kesatuan tindakan dan pikiran.
- 3) Adanya keseimbangan antara wewenang dengan tanggung jawab.
- 4) Adanya pembagian tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat masing-masing, sehingga dapat menimbulkan kerja sama yang harmonis serta kooperatif.
- 5) Bersifat relatif permanen, dan terstruktur sesederhana mungkin, sesuai kebutuhan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian.
- 6) Adanya jaminan keamanan pada anggota.
- 7) Adanya tanggung jawab serta tata kerja yang jelas dalam struktur organisasi.¹²

¹¹ Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1999), Cet. XIV, 167.

¹² Ngalm Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, 17.

c. Pengarahan (*Direction*)

Pengarahan /bimbingan (*direction*) berarti memelihara, menjaga dan memajukan organisasi melalui setiap personel, baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatannya tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan.¹³

Pengarahan juga bisa diartikan mengajak orang lain untuk dapat mengikuti apa yang diinginkan. Oleh karena itu langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu adalah memberi motivasi, mempengaruhi dan akhirnya mengarahkan.¹⁴

Dalam realitasnya pengarahan dapat berbentuk sebagai berikut:

- 1) Memberikan dan menjelaskan tujuan
- 2) Memberikan petunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan
- 3) Memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan/kecakapan dan keahlian untuk lebih efektif dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi
- 4) Memberikan kesempatan pada anggota dalam memajukan organisasi berdasarkan inisiatif dan kreatifitas masing-masing
- 5) Memberikan koreksi agar setiap personel melakukan tugas-tugasnya secara efisien.

¹³ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1996), 36.

¹⁴ Handoko, *Manajemen*, 359.

d. Kontrol/Evaluasi

Kontrol atau evaluasi dalam administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan.¹⁵

Mengamati tingkat efektivitas maksudnya menilai tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah menghasilkan sesuatu seperti direncanakan atau sekurang-kurangnya, apakah kegiatan itu telah berjalan di atas rel yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari perencanaan atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sedang mengamati tingkat efisiensi maksudnya menilai tindakan-tindakan/kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu apakah merupakan cara yang terbaik atau paling tidak untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Dengan kata lain apakah cara kerja tertentu yang sudah dipergunakan mampu memberi hasil yang maksimal.

4. Tujuan Manajemen

Manajemen dibutuhkan manusia dimana saja bekerja secara bersama (organisasi) guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, Seperti organisasi sekolah, kelompok olah raga, musik, militer atau perusahaan.¹⁶

¹⁵ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, 37.

¹⁶ Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi II (Yogyakarta: BPFP, 1989), Cet. II, 3.

Manusia dihadapkan dalam berbagai alternatif atau cara melakukan pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil. Oleh karena itu metode dan cara adalah sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.¹⁷

Menurut Winardi “manajemen itu berhubungan dengan usaha pencapaian sesuatu hal yang spesifik, yang dinyatakan sebagai suatu sasaran”¹⁸ maka manajemen merupakan alat yang efektif untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan.

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan tujuan manajemen secara umum adalah merupakan alat atau sarana yang efektif cara melakukan pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil, secara bersama (organisasi).

Adapun tujuan manajemen pendidikan menurut Nanang Fattah, menyitir pendapat Shrode dan Voich tujuan manajemen adalah produktivitas dan kepuasan seperti peningkatan mutu pendidikan, pemenuhan kesempatan kerja pada pembangunan daerah/nasional serta tanggung jawab sosial. Tujuan tersebut ditentukan berdasarkan pengkajian terhadap situasi dan kondisi organisasi, seperti kekuatan dan kelemahan, peluang, dan ancaman.¹⁹ Serta merupakan upaya mencapai keunggulan masyarakat dalam penguasaan ilmu dan teknologi serta meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Apabila produktivitas

¹⁷ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Cet. 10, 18.

¹⁸ Winardi, *Asas-Asas Manajemen* (Bandung: Alumni, 1983), 13.

¹⁹ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. 3, 15.

merupakan tujuan maka perlu dipahami makna produktivitas itu sendiri sebagai ukuran kuantitas dan kualitas kinerja dengan mempertimbangkan kemanfaatan sumber daya.

Produktivitas itu dipengaruhi oleh derajat keefektifan, efisiensi penggunaan sumber daya serta sikap mental yang senantiasa berusaha untuk terus berkembang. Produktivitas juga dapat diukur dengan dua standar utama, yaitu secara fisik dan nilai. Fisik diukur secara kuantitatif seperti banyaknya keluaran (pajang, berat, lamanya waktu, jumlah), sedang berdasarkan nilai diukur atas dasar nilai-nilai kemampuan, sikap, perilaku, disiplin, motivasi, dan komitmen. Maka dapat dipahami tujuan manajemen pendidikan adalah produktivitas, kepuasan, menjadikan masyarakat yang unggul dalam penguasaan ilmu dan teknologi berdasarkan situasi dan kondisi.

5. Pendekatan Manajemen

Bahwa semua aktivitas berkaitan satu sama lain dan dapat diidentifikasi sebagai sistem-sistem yang membentuk sebuah pola atau jaringan-jaringan yang seluruh aspek dan tindakan mengarahkan berbagai macam aktivitas kerja dapat dimengerti dan dimanfaatkan sebaikbaiknya.²⁰

Tradisi, meniru dalam memimpin (mencoba) dengan cara yang lebih sesuai dengan zaman yang mula-mula dipentingkan dari segi teknis,²¹ komersial,

²⁰ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. 3, 25.

²¹ Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, 21.

dan administrasi, kemudian merambah kepada bidang perburuhan dan kemanusiaan pada umumnya.²²

Manajemen haruslah diselenggarakan seefisien mungkin dengan dasar yang dianut karena setiap manajer memiliki filsafat hidup sendiri; dengan demikian hendaklah selalu berupaya mencapai efisiensi semaksimal mungkin serta didasarkan pada hubungan antara manusia dan Tuhan, bukan semata-mata ditujukan kepada kepentingan tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan.²³ Jadi dapat dipahami pendekatan manajemen adalah berbagai unsur kegiatan atau tindakan yang dimengerti dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk manusia, seperti hubungan manusia dengan Tuhan, manusia antar manusia dan manusia dengan alam.

Ada beberapa pendekatan manajemen yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Pendekatan Proses

Pendekatan proses dikenal dalam manajemen dengan berbagai sebutan, seperti universal, fungsional, operasional, tradisional atau klasikal prinsip-prinsip umum manajemen. Yang muncul sebagai ciri khusus pendekatan proses

²² J. Pangkyim, Ibid., 30.

²³ Ek. Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan berdasarkan Ajaran Islam* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986), 48.

klasik, yaitu: a. kesatuan komando, b. kesamaan kewenangan dan tanggung jawab, c. rentang kendali yang terbatas, d. pendelegasian hal-hal yang rutin.²⁴

b. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan ini sering disebut manajemen *sains*, yang lebih memfokuskan dari sudut pandang model matematika dan proses kuantitatif. Yang paling tepat mewakili pendekatan ini adalah teknik matematika dan *operation research*. Teknik-teknik riset semakin penting sebagai rasional untuk pembuatan keputusan. Teknik manajemen sains digunakan penganggaran modal, *sceduel* produksi, strategi produk, perencanaan program pengembangan sumber daya manusia dan sebagainya.²⁵

c. Pendekatan sistem

Segala sesuatu adalah saling berhubungan dan saling bergantung. Suatu sistem terdiri dari elemen-elemen yang berhubungan dan bergantung satu dengan yang lain; tetapi bila elemen tersebut berinteraksi, maka akan membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh.

Sehingga phenomena dapat dianalisa dan disajikan dari sudut pandangan sistem. Konsep sistem telah digunakan dalam manajemen seperti halnya analisa tentang interaksi antar manusia dan mesin, teori informasi berkaitan

²⁴ Soebagio Admodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Ardadlzya Jaya, 2000), 8.

²⁵ Handoko, *Manajemen*, 54-55.

dengan pandangan sistem walaupun demikian penekanan secara langsung terhadap studi, analisis, manajemen sebagai suatu sistem.

Perlunya pendekatan sistem bagi ilmu pengetahuan (fenomena ilmu pengetahuan) diperlukan adanya suatu sistematika, kerangka kerja teoritis yang akan menggambarkan secara umum hubungan dunia pengalaman.

d. Pendekatan Kontigensi

Pendekatan yang mencoba untuk menerapkan konsep-konsep yang dari berbagai aliran manajemen dalam situasi kehidupan yang nyata yang sering ditemui metode yang sangat efektif dalam suatu situasi tetapi tidak akan berjalan dengan baik dalam situasi-situasi lainnya.

Pendekatan yang melaksanakan kerja sama antara lingkungan dengan teori dan mencoba menjembatani kesenjangan yang ada untuk dipraktekkan (nyata). Misalnya, jika nilai-nilai sosial yang berlaku berorientasi non materialistik kebebasan, dan organisasi mempekerjakan pegawai yang profesional dalam situasi operasi teknologi tinggi, maka gaya partisipasif, gaya kepemimpinan terbuka akan merupakan hal yang efektif dalam mencapai tujuan. Sebaliknya, jika nilai-nilai sosial yang berlaku berorientasi terhadap kebendaan (materi) patuh kepada kekuasaan, dan organisasi mempekerjakan tenaga-tenaga tidak terampil bekerja untuk tugas rutin, maka, gaya kepemimpinan yang keras, otoriter merupakan yang paling efektif untuk mencapai tujuan.²⁶

²⁶ Admodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, 11.

e. Pendekatan Prilaku

Hubungan manusiawi muncul karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Kemudian kelompok kerja informal lingkungan sosial juga mempunyai pengaruh besar pada produktifitas, makhluk sosial dimotivasi oleh kebutuhan sosial, keinginan akan hubungan timbal balik dalam pekerjaan Pendekatan prilaku ini sangat berpengaruh dalam proses manajemen, khususnya dalam upaya peningkatan produktivitas suatu organisasi. Ilmu prilaku merupakan salah satu aliran yang sangat berpengaruh bagi studi prilaku organisasi. Ilmu psikologi sosial sangat berperan dalam upaya memahami prilaku individu dalam kaitannya dengan lingkungan. Serta bagian ilmu pengetahuan sosiologi adalah studi tentang prilaku individu dalam kelompok, dan hubungan antara individu.

Beberapa topik yang menjadi perhatian ilmu psikologi sosial, antara lain : sikap, formasi dan perubahannya, riset komunikasi, pengaruh jaringan komunikasi terhadap efisiensi dan kepuasan individu dan kelompok, Pemecahan masalah, analisis terhadap kerja sama dan kompetisi, pengaruh sosial, akibat kesesuaian dan faktor-faktor sosial terhadap individu dan kelompok, kepemimpinan, terutama indentifikasi dan fungsi kepemimpinan dan efektivitas.

6. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan

Ruang lingkup pengelolaan lembaga pendidikan adalah:

a. Pengelolaan pengajaran

Pengelolaan pengajaran adalah setiap usahapendidikan untuk mengatur seluruh kegiatan, baik yang bersifat intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler.

Dalam mengelola pengajaran, Ida Alaeda mengemukakan beberapa prinsip pengelolaan pengajaran yang berorientasi pada fungsi manajemen. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Burrup yaitu, tujuan yang dikehendaki harus jelas, makin operasional tujuan makin mudah terlihat dan makin tepat untuk mencapai tujuan, program itu harus sederhana (*simple*), program-program yang disusun itu harus sinkron dengan tujuan yang telah ditentukan, program itu harus bersifat menyeluruh dan program itu harus ada koordinasi terhadap komponen yang melaksanakan program dipendidikan.²⁷

Piet Sahertin berpendapat bahwa tugas pendidikan administrasi atau manajemen adalah menterjemahkan kurikulum ke proses belajar mengajar, menyusun kalenderpendidikan, mengatur jadwal, menata sistem program dipendidikan, menyusun beberapa konsep dasar, melaksanakan kegiatan pengajaran lainnya yaitu pembukaan tahun ajaran baru, pembinaan disiplin dipendidikan, penilaian siswa dan penutup tahun ajaran.²⁸

²⁷ Ibid., 68.

²⁸ Piet A. Sahertian, *Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 33.

Kepala pendidikan merupakan seorang manajer dipendidikan. Ia harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran disekolah. Untuk kepentingan tersebut, sedikitnya terdapat empat langkah yang harus dilakukan, yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan murid, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.

b. Pengelolaan kesiswaan

Manajemen peserta didik menduduki tempat yang sangat penting. Dikatakan demikian oleh karena sentral layanan pendidikan dipendidikan ada pada peserta didik. Semua kegiatan yang ada dipendidikan, baik yang berkenaan dengan manajemen pengajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan hubungan pendidikan dengan masyarakat maupun layanan khusus pendidikan, diarahkan agar peserta didik mendapatkan pelayanan yang baik.

Menurut Knzevich manajemen peserta didik (*pupil personnel administration*) sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian diluar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseleruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang pendidikan.

Jadi manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk pendidikan

sampai dengan mereka lulus pendidikan. Yang diatur secara langsung adalah segi-segi yang berkenaan dengan peserta didik secara langsung, dan segi-segi lain yang berkaitan dengan peserta didik secara tidak langsung. Pengaturan terhadap segi-segi lain selain peserta didik dimaksudkan untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik.²⁹

Tujuan pengelolaan kesiswaan adalah untuk mengatur kegiatan dalam bidang kesiswaan agar proses belajar mengajar di sekolah berjalan lancar, tertib, teratur dan tercapai apa yang menjadi tujuan pendidikan dipendidikan. Pengelolaan kesiswaan meliputi perencanaan kesiswaan, penerimaan siswa baru, pengelompokan siswa, kenaikan kelas, penjurusan, dan perpindahan siswa intrapendidikan.

Kegiatan perencanaan kesiswaan meliputi sensus pendidikan, yaitu mencatat usia anak-anak. Usia umur pendidikan dipakai sebagai dasar untuk membagi-bagikan daerah penyebaran bagi pendirian suatu pendidikan. Seluruh kegiatan sensus pendidikan dapat difungsikan untuk berbagai hal yaitu:

- 1) Menetapkan perlunya perencanaan jumlah dan lokasi pendidikan.
- 2) Menetapkan beberapa batas daerah penerimaan siswa di suatu pendidikan.
- 3) Mempersiapkan fasilitas pengangkutan.
- 4) Memproyeksikan layanan program pendidikan bagi pendidikan yang memerlukan.

²⁹ Ali Imron dan Burhanuddin, Ibid., 52.

- 5) Menata kewajiban belajar dan undang-undang tenaga kerja bagi anak-anak.
- 6) Mempersiapkan fasilitas pendidikan khusus.
- 7) Menganalisa tingkat dan laju pertumbuhan umur usiapendidikan pada suatu daerah tertentu.
- 8) Membuat rayonisasi bagi anak yang akan masuk atau daripendidikan kesekolah lain.
- 9) Merekam informasi mengenai jumlah dan pertumbuhan pendidikan swasta.merekam dari berbagai sumber mengenai sumbangan masyarakat terhadap kemajuanpendidikan.³⁰

Dalam kegiatan penerimaan siswa baru bergantung pada jumlah kelas atau fasilitas tempat duduk yang tersedia dipendidikan. Kegiatan kesiswaan selanjutnya yang perlu dilaksanakan ialah pengelompokan siswa. Pengelompokan siswa diadakan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dipendidikan bisa berjalan lancar, tertib, dan bisa tercapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah diprogramkan.

Ada beberapa jenis pengelompokan siswa, diantaranya yang dilaksanakan ialah:

- 1) Pengelompokan dalam kelas-kelas.
- 2) Pengelompokan dalam bidang studi.

³⁰ Piet A. Sahertian, *Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah*, 104-105.

- 3) Pengelompokan berdasarkan spesialisasi.
- 4) Pengelompokan dalam sistim kredit.
- 5) Pengelompokan berdasarkan kemampuan.
- 6) Pengelompokan berdasarkan minat.

Dalam kegiatan ini kepalapendidikan membentuk panitia atau menunjuk beberapa orang guru untuk bertanggung jawab dalam tugas tersebut.

Keberhasilan, kemajuan, dan prestasi belajar para siswa memerlukan data yang otentik, dapat dipercaya, dan memiliki keabsahan. Data ini diperlukan untuk mengetahui dan mengontrol keberhasilan atau prestasi kepalapendidikan sebagai manajer pendidikan dipendidikannya. Kemajuan belajar siswa ini secara pereiodik harus dilaporkan kepada orang tua, sebagai masukan untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan dan membimbing anaknya belajar, baik di rumah maupun dipendidikan.

Jadi tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap kepribadian, serta aspek sosial emosional, di samping ketrampilan-ketrampilan lain.pendidikan tidak hanya bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi memberikan bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang bermasalah, baik dalam belajar, emosional, maupun sosial, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan data yang lengkap tentang peserta didik. Untuk itu dipendidikan perlu dilakukan

pencatatan dan ketatalaksanaan kesiswaan, dalam bentuk buku induk, buku laporan keadaan siswa, buku presensi siswa, buku rapor, daftar kenaikan kelas, buku mutasi dan sebagainya.

c. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dipendikikan pada dasarnya merupakan salah satu bidang kajian manajemenpendidikan atau manajemen pendidikan dan sekaligus menjadi tugas pokok manajerpendidikan atau kepalapendidikan.

Manajemen sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien.³¹

Sarana pendidikan menurut Ibrahim adalah semua perangkat peraturan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan dipendikikan. Menurut pakar pendidikan mengklasifikasikannya menjadi beberapa macam sarana pendidikan yang ditinjau dari beberapa sudut pandang. Pertama, ditinjau dari habis dan tidaknya di pakai, kedua, di tinjau dari bergerak dan tidaknya, ketiga, ditinjau dari hubungan proses belajar mengajar.

Prasarana pendidikan adalah semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan dipendikikan. Prasarana pendidikan dipendikikan bisa di klasifikasikan menjadi dua macam prasarana

³¹ Ibrahim Bapadal, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), 86.

pendidikan. Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, ruang laboratorium, kedua, prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi sangat menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, seperti ruang kantorpendidikan dan lain-lain.

Secara umum tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan dipendidikan adalah untuk memberikan layanan secara profesional dibidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Agar tujuan dapat tercapai ada beberapa prinsip yang perlu di perhatikan, yaitu pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan dipendidikan harus selalu dalam kondisi siap pakai oleh personelpendidikan dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar mengajar. Kedua, prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan disekolah harus di lakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Ketiga, prinsip administratif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan dipendidikan harus selalu memperhatikan undang-undang peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang. Keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan dipendidikan harus

diselenggarakan oleh personel pendidikan yang mampu bertanggung jawab. Kelima, prinsip kekohesifan, bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan dipendidikan harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja pendidikan yang sangat kompak.³²

Jadi manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan pendidikan yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun bagi murid untuk berada dipendidikan. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar.

d. Pengelolaan keuangan

Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian sekoah. Soal-soal yang menyangkut keuangan pendidikan pada garis besarnya berkisar pada uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personil dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan seperti perbaikan sarana dan prasarana.³³

³² Ibid., 87.

³³ Suryo Subroto, *Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan Sekolah* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 92.

Menurut Maisyaroh, manajemen keuangan berarti suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.³⁴

Pendidikanpendidikan yang hasilnya dapat dilihat dikemudian hari perlu mendapat pembiayaan yang memadai. Yang sesuai dengan Tap.MPR yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Sumber dana dan biaya dari pemerintah yaitu, pemerintah pusat menyediakan sebagian pendapatan negara untuk keperluan pendidikan, selain itu pemerintah daerah juga menyerahkan sebagian dari pendapatannya baik berasal dari subsidi pemerintah pusat maupun dari pendapatan daerah untuk keperluan pendidikan. Dana pembangunan melalui DIP untuk inovasi pendidikan, rehabilitasi gedung, alat laboratorium, alat workshop, buku paket dan sebagainya.

Untuk dana dari orang tua berupa SPP. Hasil dari SPP tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan yaitu, pelaksanaan pelajaran, pengadaan rapat dan STTB, kesejahteraan pegawai, perbaikan sarana, kegiatan siswa, supervisi dan pengelolaan.³⁵

³⁴ Maisyaroh, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), 97.

³⁵ Piet A. Sahertian, *Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah*, 211-212.

Dana dari sumber masyarakat, baik pendidikan negeri maupun swasta bantuan keuangan juga diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat dan alumni. Bahkan untuk keseragaman perwujudan bantuan untuk pembinaan pendidikan dan pengajaran di berbagai tingkatan dan jenis pendidikan negeri, didasarkan pada instruksi bersama.

Dalam penggunaan anggaran dan keuangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan dan keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan. Dalam menyusun anggaran perlu di perhatikan kecenderungan yang memungkinkan akan terjadi pada masa depan seperti laju inflasi, kenaikan gaji dan upah. Selain itu perlu dipertimbangkan kemungkinan terjadinya perubahan kebijaksanaan dan perubahan jadwal penjatahan pengelolaan keuangan di lapangan bersifat teknis dan operasional dilaksanakan oleh bendaharawan.

Komponen utama manajemen keuangan meliputi, (1) prosedur anggaran; (2) prosedur akuntansi keuangan; (3) pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian; (4) prosedur investasi; (5) prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan

penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala pendidikan, sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi sebagai bendahara, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan disekolah. Komponen keuangan pada suatupendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar dipendidikan bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan pendidikan memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari.

B. Pendidikan Anti Korupsi

1. Definisi Korupsi

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.³⁶

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul “*Arthashastra*” yang membahas masalah korupsi di masa itu³⁷.

Dalam literature Islam, pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW. juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.

³⁶ Ridlwan Nasir, (Ed.), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer* (Surabaya: IAIN Press & LKiS, 2006), 277.

³⁷ Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda (Ed.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih* (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), 1.

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.³⁸ *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap³⁹

Samuel Huntington dalam buku *Political Order in Changing Societies*, mendefinisikan korupsi sebagai behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends.⁴⁰

Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) yang menjadi bahasan utama serta norma (*norms*) yang diterima dan dianut masyarakat.

Definisi korupsi di atas mengidentifikasikan adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: "Corruption is abuse of trust in the interest of private gain", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁴¹

³⁸ Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi* (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), 28.

³⁹ Ridlwan Nasir, (Ed.), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, 281-282.

⁴⁰ Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, 59.

⁴¹ Syamsul Anwar (Et.al), *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), 10.

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary) korupsi didefinisikan sebagai ”penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa”.

Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank adalah ”penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh Transparency International (TI), yaitu ”korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.”⁴²

Definisi lengkap menurut Asian Development Bank (ADB) adalah ”korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri

⁴² Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda (Ed.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih* (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), 24.

mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

Sedangkan Bazwir mengutip Braz dalam Lubis dan Scott– menengarai bahwa “korupsi” dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam dan eksplisit, dapat diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur didalamnya: *Pertama*, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batasan kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan *Kedua*, pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena, perlu ada paradigma baru (*new pardigm*) yang merupakan perubahan paradigma (*shifting paradigm*) ke arah yang lebih baik dan komprehensif dalam memahami upaya pemberantasan korupsi.

Diantara penyebab kurangnya mobilitas peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dikarenakan ketidak tahuan tentang makna, hakikat dan kategorisasi korupsi, yang semakin berkembang dan rumit. Secara *lughowiyah* (kebahasaan), definisi korupsi memiliki makna yang jelas dan tegas. Namun secara praktis makna korupsi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga definisi korupsi selalu berkembang, baik secara normatif maupun secara sosiologis. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim riset Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi.⁴³

2. Model-model Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah

⁴³ Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 76.

sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (*habit*) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini.

Seiring dengan perkembangan jaman dan budaya masyarakat korupsi pun ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk, model atau jenis yang

beragam. Banyak para pakar yang telah mencoba mengelompokkan jenis-jenis atau model-model korupsi.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat diringkas secara umum bentuk-bentuk, karakteristik atau ciri-ciri, dan unsur-unsur (dari sudut pandang hukum) korupsi sebagai berikut :

- a. *Penyuapan (bribery)* mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
- b. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
- c. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
- d. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
- e. *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
- f. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.

g. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau “korupsi berjama’ah”.

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi. *Pertama*, korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. *Kedua*, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. *Ketiga*, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. *Keempat*, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi⁴⁴.

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang.

Jeremy Pope⁴⁵ – mengutip dari Gerald E. Caiden dalam “*Toward a General Theory of Official Corruption*” – menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

a. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.

⁴⁴ Anwar (Et.al), *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, 18.

⁴⁵ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*, (terj.) Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), xxvi.

- b. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
- c. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
- d. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
- e. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
- f. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
- g. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
- h. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
- i. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
- j. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.
- k. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.

- l. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
- m. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
- n. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
- o. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
- p. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
- q. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
- r. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
- s. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Sedangkan menurut Aditjondro,⁴⁶ secara aplikatif ada tiga model lapisan korupsi, yaitu:

a. Korupsi Lapis Pertama

Penyuapan (*bribery*), yaitu dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan (*extortion*) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya.

⁴⁶ George Junus Aditjondro, *Jurnal Wacana: Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Suatu Kerangka yang Lebih Holistik bagi Gerakan Anti-Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: Insist Press, 2003), 22.

b. Korupsi Lapis Kedua

Jejaring korupsi (*cabal*) antara birokrat, politisi, aparat penegakan hukum dan perusahaan yang mendapat kedudukan yang istimewa. Biasanya ada ikatan yang nepotistis diantara beberapa anggota jejaring korupsi yang dapat berlingkup nasional.

c. Korupsi Lapis Ketiga

Jejaring korupsi (*cabal*) berlingkup internasional, dimana kedudukan aparat penegakan hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga penghutang dan atau lembaga-lembaga internasional yang punya otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terpilih oleh pimpinan rezim yang jadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut.

Tiap tindakan korupsi pasti mengandung pengkhianatan kepercayaan dan penyimpangan. Lebih jauh lagi pengkhianatan kepercayaan ini bukan hanya terhadap kepercayaan dari publik atau masyarakat, melainkan juga kepercayaan dari Allah SWT. Yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

Penyimpangan terhadap nilai-nilai yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah diantaranya adalah nilai integritas, akuntabilitas (*mas'uliyah*), dan kepemimpinan. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan

menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik kulminasi korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali, dan yang terjadi koruptor teriak koruptor. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak.

Selain model-model korupsi seperti di atas, terdapat banyak ciri-ciri perilaku korupsi. Syed Hussein Alatas⁴⁷ menyebutkan ciri-ciri korupsi antara lain yaitu :

- a. Biasanya melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Melibatkan keserbarhasiaan kecuali telah berurat berakar.
- c. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik (tidak selalu uang).
- d. Pelaku biasanya berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Pelaku adalah orang yang mampu mempengaruhi keputusan.
- f. Mengandung penipuan kepada badan publik atau masyarakat umum.
- g. Pengkhianatan kepercayaan.
- h. Melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif.
- i. Melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban.
- j. Kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.

⁴⁷ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1975). 46

3. Sebab-sebab Korupsi

Secara umum, munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi. *Pertama*, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. *Kedua*, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari perilaku itu sendiri.⁴⁸

Motivasi kedua ini seperti adanya alasan melakukan korupsi karena ekonomi, ambisi memperoleh jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karir jabatan secara pintas.

Dalam istilah lain juga disebutkan faktor korupsi terdiri dari faktor internal (dari dalam diri) dan faktor eksternal (dari luar diri). Faktor internal semisal sifat rakus terhadap harta, atau terbentur kebutuhan mendesak yang memicu seseorang melakukan korupsi. Sedangkan faktor eksternal seperti sistem pemerintahan yang memberikan peluang korupsi, lemahnya pengawasan-hukum, dan tidak adanya akuntabilitas.

Alatas menjelaskan beberapa hal yang menjadi penyebab korupsi yaitu⁴⁹:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mempengaruhi tingkah laku menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran agama dan etika.

⁴⁸ Anwar (Et.al), *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, 13.

⁴⁹ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, 46.

- c. Konsumerisme dan globalisasi.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tidak adanya tindak hukuman yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal atau transisi demokrasi.

Korupsi juga sangat erat hubungannya dengan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kekuasaan cenderung absolut dan represif maka kesempatan adanya praktik korupsi semakin besar. Tidak salah bila Lord Acton mengatakan, *power corrupts, and absolute power corrupts absolutely*.

Semakin mutlak kekuasaan, semakin besar pula kesempatan korupsi⁵⁰. Secara eksplisit, terjadinya korupsi setidaknya disebabkan oleh tiga hal. *Pertama, corruption by greed* (keserakahan). Korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh atau bahkan sudah kaya. Namun karena mental serakah dan rakus menyebabkan mereka terlibat korupsi. Kasus korupsi karena keserakahan inilah yang banyak terjadi di lingkungan pejabat tinggi negara. *Kedua, corruption by need* (kebutuhan). Korupsi ini disebabkan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic need*). Korupsi ini

⁵⁰ Tempo; Juli 2008.

banyak dilakukan oleh karyawan atau pegawai kecil, polisi atau prajurit rendah dan lain-lain.

Ketiga, corruption by chance (peluang). Korupsi ini dilakukan jelas karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korup, peluang besar untuk cepat kaya secara pintas, peluang naik jabatan secara instan, dan sebagainya. Biasanya ini didukung dengan lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, serta lemahnya hukum yang tidak membuat jera.

Seringkali korupsi dalam kenyataannya justru diberi kesempatan dan diberi peluang sehingga menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk berbuat korup seperti menerima suap. Dari segi *behaviour*, problem utama tindak perilaku korupsi sangat berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Sedangkan secara sosiologis, latar belakang terjadinya korupsi pun dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:⁵¹

- a. Masyarakat tidak memiliki gambaran jelas tentang jenis dan bentuk yang dianggap sebagai tindak korupsi.
- b. Ajaran-ajaran keagamaan di Indonesia kurang memberikan petunjuk yang kuat tentang korupsi dalam perspektif moral.
- c. Para pemimpin elit masyarakat tidak mengkampanyekan gerakan antikorupsi secara intens.

⁵¹ Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi* (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), 44.

- d. Tidak ada kurikulum etika dan standard metodik tentang bagaimana cara membangun kesadaran warga negara terhadap problem korupsi. Masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara melaporkan kasus korupsi yang merugikan kepentingan publik.
- e. Terjadi banyak pembenaran perilaku korupsi, asal bermanfaat untuk kepentingan lain (kelompok, agama, suku, dan sebagainya).

Lebih lanjut Alatas mendeskripsikan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain: problem kepemimpinan, problem pengajaran agama dan etika, latar belakang sejarah (kolonialisme), kualitas pendidikan yang rendah, faktor kemiskinan dan gaji yang rendah, penegakkan hukum yang lemah dan buruk, sistem kontrol yang tidak efektif, struktur dan sistem pemerintahan.

Eksplisitas penyebab terjadinya korupsi secara universal juga dikarenakan: lemahnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi (baik profit maupun non profit) yang bersifat tertutup (tidak transparan) dan cenderung otoriter, kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegakan hukum serta sanksi hukum yang tidak menjerakan bagi pelaku korupsi, minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari, rendahnya upah pegawai atau karyawan yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan.

Hal yang tak kalah pentingnya juga untuk dapat mencegah secara efektif terjadinya korupsi adalah hendaknya dihindari pengukuran korupsi yang semata-mata bertujuan untuk mendeteksi pelaku korupsi dan menghukumnya. Penting untuk mulai menempatkan strategi pencegahan korupsi dengan tujuan untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi sejak dini. Dalam menetapkan strategi pencegahan korupsi, perlu diidentifikasi dan dianalisa faktor-faktor yang menjadi akar penyebab yang berkontribusi menimbulkan korupsi pada lembaga publik dan layanan publiknya.

Semua sebab-sebab di atas terkadang menyatu. Dengan kata lain, seorang koruptor disamping mentalnya serakah, dipicu oleh kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi, juga ditunjang adanya peluang untuk melakukan korupsi.

C. Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembentukan Moral

Sebagaimana halnya negara-negara lainnya, perilaku koruptif di Indonesia sudah berlangsung sepanjang sejarah. Secara kualitatif, puluhan tahun lalu Bung Hatta pernah memberikan label atas hal korupsi sebagai perilaku yang telah membudaya. Bahkan secara kuantitatif, Begawan ekonomi Indonesia, Prof. Soemitro Djojohadikusumo pernah mengemukakan pernyataan kontroversial yang menyatakan bahwa kebocoran anggaran pembangunan di Indonesia mencapai 30 persen.⁵²

⁵² Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Meski begitu kompleksnya problematika korupsi, pendidikan masih dapat diharapkan untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi kepada para anak didik, sehingga sejak dini mereka memahami bahwa korupsi itu bertentangan dengan norma hukum maupun agama.

Hal tersebut dapat dicermati setidaknya dikarenakan dua hal. *Pertama*, gejala reduksi moralitas sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, dengan indikasi empirik masih tingginya angka korupsi. *Kedua*, arus masuk generasi muda ke lembaga pendidikan setiap jenjang sebagai bagian dari diskursus pengembangan SDM indonesia yang seutuhnya.

Hal ini sangat berkaitan, karena orang-orang yang terpilih mengemban amanat rakyat, terutama mereka yang duduk di lingkungan birokrasi, diidealisasikan sebagai SDM terdidik sebagai *output* dari lembaga pendidikan.

Manusia Indonesia menempati posisi sentral dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga diperlukan adanya pengembangan sumber daya manusia secara optimal. Lebih lanjut pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, mulai dari dalam keluarga hingga lingkungan sekolah dan masyarakat.

Konsep dasar pendidikan antikorupsi secara filosofis merupakan agregasi dari internalisasi hakikat korupsi (ontologis), pemahaman praktik korupsi

(epistemologis) serta aplikasi moral antikorupsi dalam tindakan (aksiologis) untuk mencegah perilaku korupsi.

1. Falsafah Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat; suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi bangsa (baca: peserta didik) dalam memajukan budi pekerti, pikiran, tindakan untuk menentang korupsi.

Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan merupakan basis falsafah dalam pendidikan nilai, moral agama. Secara filosofis korupsi hanya dipahami sebagai tindakan merusak (stabilitas nasional, etika, dan norma individu pelakunya) artikulasi nilai-nilai yang sudah mapan (*established*) dalam konstruksi sosial budaya masyarakat bahkan agama. Mendidik sendiri pada umumnya dipahami sebagai suatu cara untuk menyiapkan dan membantu seseorang untuk mencapai tujuan hidup, yaitu menjadi manusia utuh, sempurna

dan bahagia. Secara lebih eksplisit pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia muda, membantu seseorang menjadi manusia yang berbudaya dan bernilai tinggi.

Bukan hanya hidup sebagai manusia *an sich*, tetapi menjadi manusia yang bermoral, berwatak, bertanggung jawab dan bersosialitas. Sehingga dengan pendidikan, seseorang akan dibantu untuk menjadi manusia yang aktif dalam membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Dengan demikian falsafah pendidikan antikorupsi didasarkan pada proses pengenalan dan pemberian informasi nilai-nilai antikorupsi (ontologis-epistemologis) dengan harapan membantu peserta didik untuk menjadi manusia yang bermoral (aksiologis), berwatak serta bertanggung jawab dalam rangka membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Pendidikan antikorupsi membimbing para generasi bangsa menjadi manusia yang berbudaya antikorupsi, berwatak antikorupsi, bertanggung jawab terhadap problematika korupsi, dan bersosialitas dalam upaya pencegahan korupsi. Karena disadari atau tidak, korupsi pasti juga dialami oleh para generasi muda. Pada saat tertentu generasi muda dapat menjadi korban korupsi, pelaku korupsi, atau ikut serta juga melakukan atau terlibat perkara korupsi, dan sangat mungkin pula menjadi pihak yang menentang korupsi. Signifikansi pendidikan dengan demikian harus mampu menjadikan diri peserta didik sebagai salah satu instrumen perubahan yang mampu melakukan *empowerment* (terhadap tindak

korupsi) dan transformasi bagi masyarakat melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan sosial. Melalui pendekatan tersebut, berbagai bentuk pathologi sosial berupa penyimpangan praktikpraktik kehidupan sosial-kemasyarakatan seperti korupsi dapat dianalisis dan dicarikan alternatif solusinya.

Dalam konteks tersebut, pendidikan harus juga dimaknai dan dimanfaatkan sebagai instrumen, selain harus mampu mentransformasikan nilai-nilai moral, pendidikan juga berfungsi melakukan *social engineering* guna membangun sosial religi yang efektif dan seimbang. Konsep strategis dan krusial yang harus diimplementasikan selanjutnya adalah bagaimana problematika korupsi di Indonesia menjadi pokok bahasan tertentu dalam kurikulum pendidikan. Bukan hanya sebagai suplemen bagi pendidikan moral pancasila (kewarganegaraan), melainkan juga bagi pendidikan agama (Islam).

2. Konsep Pendidikan Antikorupsi

Sebagai agama yang sempurna dan universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan sang Khalik (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan antar sesama makhluk (*hablum minannas*), serta hubungan manusia dengan alam (*hablum minal 'alam*). Oleh karenanya, Islam mengajarkan secara komprehensif beberapa prinsip agar hubungan antar manusia menjadi harmonis dan beradab.

Lebih jauh, Islam melalui kitab suci al-Qur'an telah memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan. Hal tersebut mengandung unsur universalitas Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Sebagaimana statemen dalam al-Qur'an menyatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q. S. Al-Baqarah/2:208)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadinya korupsi dikarenakan para pelaku tidak menjalankan Islam secara keseluruhan. Terlebih dalam hal materi yang sangat dianjurkan oleh Islam untuk tidak berlebih lebihan sebagai mana yang di jelaskan dalam qur'an:

۞ يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجٰتَكَرَّ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q. S. Al-A'raf/7: 31).

Lalu berbagai asumsi pun muncul, bagaimana sebetulnya Islam menyikapi hakikat dan problematika korupsi. Dalam kasus-kasus korupsi, sesungguhnya para pelakunya tak hanya mengkorupsi uang, tetapi lebih dari itu ia telah melakukan korupsi moral. Sebab, dengan perilaku korupsi, ia sesungguhnya telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keluhuran nilai-nilai moral dan hati nurani yang diwariskan para pendahulu yang luhur budi.⁵³ Korupsi juga merupakan wujud prahara sosial. disinyalir bahwa masalah sosial disebabkan oleh empat hal, yakni: *Pertama*, sikap *ahumanis*, yakni tidak memuliakan anak yatim. *Kedua*, *asosial*, yakni tidak memberi makan orang miskin. *Ketiga*, *monopolistik*, yaitu memakan warisan (kekayaan) alam dengan rakus. *Keempat*, sikap *hedonis*, mencintai harta benda secara berlebihan. Dilihat dari empat hal tersebut, korupsi masuk dalam setiap sendi itu. Ditinjau dari segi Islam, kasus korupsi termasuk dalam wilayah *mu'amalah maliyah* (sosial-ekonomi) atau *fiqh siyasah* (hukum tata negara) yang tertumpu pada permasalahan *maliyah* (benda). Dalam al- Qur'an terdapat beberapa ayat yang mampu membentuk kesadaran moral manusia untuk tidak rakus memakan harta

⁵³ Yunahar Ilyas (Et.al.), *Korupsi Dalam Perspektif Agama-agama (Panduan Untuk Pemuka Umat)*, (Yogyakarta: KUTUB, 2001), 15.

rakyat. Al-Qur'an juga mempunyai perangkat teoritis untuk memberantas korupsi, seperti melarang umat Islam untuk memilih kaum penindas untuk jadi penguasa¹, apalagi melakukan korupsi yang sangat merugikan orang banyak.

Korupsi secara definitif juga ditandai oleh sejumlah interpretasi keagamaan tentang tindak pidana tersebut. Para ulama, misalnya, menganalogikan korupsi dengan *al-ghulûl*, sebuah istilah yang diambil dari ayat al-Qur'an Surat Ali 'Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

Secara leksikal dapat dipahami bahwa pengertian denotatif dari ayat ini adalah “pengkhianatan atau penyelewengan”, namun dalam wilayah perkembangan kajian fiqih (Islam)—khususnya dalam konteks kekinian atau permasalahan kontemporer—istilah ini didefinisikan setara dengan “korupsi”. *Asbabun nuzul* ayat ini diketengahkan Abu Daud dan juga oleh Tirmizi dalam sebuah hadits yang menganggapnya sebagai hadis hasan dari Ibnu Abbas,

katanya, "Ayat ini diturunkan mengenai selemba permadani merah yang hilang di waktu perang Badar. Kata sebagian orang, 'Mungkin yang mengambilnya Rasulullah SAW. Maka Allah menurunkan ayat, "Tidaklah mungkin bagi seorang nabi berkhianat terhadap urusan harta rampasan..." (Q.S. Ali Imran/3: 161).

Asal kata "*yaghulla*" dari "*ghalla-yaghullu-ghulûlan*", memiliki arti "berkhianat, menipu. Sebagian dari para mufassir (diantaranya Ibnu Katsir, Qurthubi dan Thabari) menafsirkan "*an yaghulla*" dengan kata "*an yakhûna*"³, yang berarti "khianat atau berkhianat yang dalam ayat ini berbentuk *fi'il* atau kata kerja". Ibnu Katsir ketika menafsirkan Q.S. Ali 'Imran/3: 161 mendefinisikan *al-ghulûl* dengan rumusan: "menyalahgunakan kewenangan—dalam urusan publik—untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya, sehingga mengakibatkan adanya kerugian publik".

3. Pendidikan Moral Sebagai Dasar Pendidikan Antikorupsi

Prof. Schoorl menyatakan, bahwa praktik-praktik pendidikan merupakan wahana terbaik dalam menyiapkan SDM dengan derajat moralitas yang tinggi. Dalam tujuan pendidikan nasional idealisasi tersebut juga termuat dalam UU-RI No.2 Tahun 1989, pasal 4. "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan”⁵⁴

Dilihat dari tujuan pendidikan tersebut, pendidikan sejatinya merupakan proses pembentukan moral masyarakat beradab, masyarakat yang tampil dengan wajah kemanusiaan dan pemanusiaan yang normal. Dengan kata lain, pendidikan adalah moralisasi masyarakat, yakni peserta didik. Tentunya, pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan di sekolah (*education not only education as schooling*), melainkan pendidikan sebagai jaring-jaring kemasyarakatan (*education as community networks*). Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar, atau salah, baik atau buruk⁵⁵

Konseptualisasi moral memiliki beberapa tingkatan, yaitu standar moral, aturan moral, dan pertimbangan moral. Standar moral adalah prinsip-prinsip moral dasar yang paling fundamental yang merupakan basis pijakan atau asumsi untuk menentukan apakah secara moral sebuah tindakan itu diperkenankan atau tidak, baik atau tidak, diterima masyarakat atau tidak. Aturan moral memuat prinsip-prinsip moral yang diderivasikan dari standar moral. Aturan moral merupakan tindakan yang dianggap benar atau salah dengan berdasarkan pada kriteria yang diformulasikan oleh standar moral. Sedangkan pertimbangan moral

⁵⁴ George Junus Aditjondro, *Jurnal Wacana: Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Suatu Kerangka yang Lebih Holistik bagi Gerakan Anti- Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: Insist Press, 2003), 63.

⁵⁵ Kwik Kian Gie, *Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan* (ttp., tth), 118.

merupakan evaluasi moral terhadap dimensi kepribadian sekaligus tindakan-tindakan seseorang, baik yang bersifat umum maupun spesifik.

Secara konseptual baik dari aspek standar moral, aturan dan pertimbangan moral korupsi sangat bertentangan dengan nilai moral yang ada didalam sebuah masyarakat. Perbuatan korupsi dapat menyebabkan delegitimasi nilai-nilai moral yang sudah ada.

4. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan diyakini menjadi akar dalam menyelesaikan setiap kasus kehidupan. Termasuk permasalahan yang selalu menyedot perhatian publik yaitu kasus korupsi. Pendidikan itu berfungsi untuk menjadikan manusia seutuhnya. Tidak terpisahkan antara sikap dan pemikiran.

Pendidikan yang ada di indonesia selama ini hanya lebih dominan mengembangkan pendidikan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Maka untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tatanan *moral action*, agar peserta didik tidak berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, smpai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*), dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari.⁵⁶

Sementara menurut lickona, untuk menjadikan moral anak pada tataran *moral action* diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses kwoinnng, moral feeling, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya

⁵⁶ Hujair AH. Sanaky, 2010.

harus di kembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, pinter, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Adapun kecerdasan spritual, memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah Swt, gemar berbuat baik karena *lillahi ta'alah*, disiplin peribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kenestetik, adalah menciptakan kepedulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal, dan sebagainya. Maka sosok yang mengembangkan beberapa kecerdasan tersebut, di harapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi.⁵⁷

Menurut biyanto, ada beberapa alasan betapa pentingnya pendidikan antikorupsi segera di aplikasikan di sekolah hingga perguruan tinggi. Beberapa urgensi diterapkannya pendidikan antikorupsi itu diantaranya: *Pertama*, dunia

⁵⁷ Kementrian Pendidikan Nasional. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Berdasarkan Pengalaman Di Satuan Pendidikan Rintisan)* (Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum Dan Perbukuan, 2011), 121.

pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki perangkat pengetahuan (*knowledge*), untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kasalah pahaman dalam pemberantasan korupsi. Itu karena sampai saat ini definisi korupsi baru sebatas pada pengertian yang bersifat legal-formal. Sementara, beberapa bentuk praktik korupsi telah tumbuh subur dan menggurat akar di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam situasi seperti ini lembaga pendidikan dengan sumber daya yang dimiliki, dapat menjadi refrensi untuk mencerahkan proplematika praktik korupsi.

Sebagai contoh, budaya suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi, telah dipahami secara berbeda oleh masyarakat. Sebagian menyatakan bahwa dalam kasus suap-menyuap sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak yang disuap beruntung karena memperoleh tambahan penghasilan diluar semestinya. Pihak penyuap pun merasa beruntung karena memperoleh kemudahan dalam mengurus persoalan.

Sepintas jalan pikiran sebagaimana telah disebutkan benar. Tetapi, jika diamati maka dapat dikemukakan bahwa dalam kasus suap-menyuap itu yang paling dirugikan adalah sistem. Hal ini karena budaya suap-menyuap dapat merusak sistem sehingga tidak dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and goodgovernance*). Akibatnya, hanya orang berduit yang dapat mengakses kemudahan dalam pelayan puplik.

Sementara mereka yang tidak memiliki uang harus memperoleh perlakuan berbeda.⁵⁸

Kedua, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (*networking*) yang kuat hingga keseluruhan penjuru tanah air. Melibatkan pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat massif. Dengan gerakan yang massif ini diharapkan pada saatnya Indonesia dapat keluar dari problem korupsi.

Ketiga, jika ditelisik latar belakang sosial satu persatu pelaku tindak korupsi dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka adalah alumni perguruan tinggi. Mereka rata-rata bergelar sarjana. Ini berarti secara sosial mereka tergolong berpendidikan yang cukup mapan. Persoalannya, mengapa mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jawabannya selain faktor kesengajaan untuk memperkaya diri, sangat mungkin perbuatan tersebut dilakukan karena mereka tidak mengetahui seluk beluk tindak pidana yang dapat dikategorikan korupsi.

Dengan beberapa argumentasi tersebut, maka lembaga-lembaga pendidikan dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga mampu memberikan sumbangan yang berharga untuk pemberantasan korupsi dan penegakan integritas publik (*public integrity*), yang harus disadari, bahwa pemberantasan

⁵⁸ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah; Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 42.

korupsi melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Maka hasilnya pun tidak dapat dilihat dalam sekejap. Apalagi pengalaman menunjukkan bahwa kantin kejujuran di sekolah-sekolah yang dengan susah payah di bangun telah berguguran satu demi satu. Pengandaan kantin kejujuran yang sejak awal diharapkan dapat membangun kultur jujur dikalangan civitas akademika sekolah ternyata mengalami ke bangkrutan.⁵⁹

Fenomina di atas jelas sangat ironi. Sebab untuk membangun kultur jujur dilembaga pendidikan tidak mudah. Tetapi sebagai investasi rasanya kita masih layak berharap pada lembaga pendidikan. Tantangan sekrang adalah menemukan strategi yang tepat untuk memasukkan nilai-nilai kejujuran dalam sistem pendidikan. Pilihan yang tepat diambil adalah menyusun meteri pendidikan antikorupsi tersendiri sebagai mata pelajaran atau melalui strategi penyisipan.

Jika meliaht kurikulum yang sudah demikian gemuk maka pilihannya adalah strategi penyisipan materi antikirupsi pada mata pelajaran relevan kiranya dapat dipertimbangkan. Melalui cara *inserting* ini pelaksanaan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan lebih fleksibel. Dengan cara ini maka kita layak berharap agar anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menjadi pejuang antikorupsi dan berintegritas.⁶⁰

⁵⁹ Ibid., 43.

⁶⁰ Ibid., 43.